Harian Jogja (Hal.3/HLD) **Sabtu, 21 Juni 2025**

▸ PERUMAHAN RAKYAT

Animo Masyarakat Tinggi, Rusunawa Selalu Penuh

UMBULHARJO—Antusiasme masyarakat Kota Jogja untuk tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) terpantau sangat tinggi. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja menyatakan seluruh unit rusunawa yang dikelola saat ini semuanya penuh.

Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Rusunawa DPUPKP Kota Jogja, Basari Budi Jadmiko, mengaku jumlah rusunawa di Kota Jogja terbatas. Sementara, animo masyarakat untuk tinggal di rusunawa terbilang tinggi. Saat ini hanya ada tiga rusunawa di Kota Jogja, yaitu Rusunawa Cokrodirjan, Juminahan, dan Bener dengan total kapasitas mencapai 244 unit hunian.

"Rusunawa Bener dibangun 2019, kemudian Juminahan pada 2007, dan Cokrodirjan yang tertua, dibangun pada 2003. Rusunawa Bener menjadi yang paling diminati karena fasilitasnya lebih memadai. Cokrodirjan relatif kurang diminati karena akses yang menurun," ungkap Basari, Kamis (20/6).

Rusunawa Bener memiliki 84 unit hunian tipe 36 yang terdiri dari dua kamar, dapur, ruang tamu, kamar mandi dan tempat jemuran. Sementara, Rusunawa Juminahan memiliki 68 unit dan Rusun Cokrodirjan 72 unit. Kedua rusunawa tersebut dibangun dengan tipe 21 yang terdiri dari satu kamar tidur, satu ruang keluarga yang menyatu dengan dapur dan satu kamar mandi.

"Secara umum semua rusunawa penuh. Di Rusunawa Bener hanya tersisa tiga unit khusus difabel yang belum terisi. Untuk Rusunawa Juminahan penuh, sedangkan di Cokrodirjan kamar ada yang kosong karena ada kerusakan dan belum diperbaiki, terutama masalah struktur beton," katanya.

Syarat utama penghuni rusunawa adalah warga ber-KTP Kota Jogja dan telah berkeluarga. Mereka menyewa dengan masa kontrak tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa kontrak. Besarnya tarif sewa bervariasi tergantung rusun dan lantai, mulai dari Rp215.000 hingga Rp655.000 per bulan, dengan ketentuan hanya bagi masyarakat berpenghasilan antara satu hingga dua kali UMK.

"Daftar tunggu saat ini sekitar 10 keluarga. Mereka akan kami proses lebih lanjut jika ada penghuni yang keluar. Kami juga mewawancarai pendapatan dan keseharian mereka sebelum diputuskan bisa menghuni," kata Basari.

Menurut Basari, tingginya animo warga mencerminkan kebutuhan akan hunian yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, keterbatasan lahan dan anggaran membuat Pemkot belum mampu membangun rusunawa baru secara optimal.

"Saat ini, hanya satu rusun yang didanai dari Dana Keistimewaan [Danais]. Sisanya dibangun melalui APBN. Pemkot belum punya alokasi anggaran untuk pembangunan rusunawa baru," tuturnya.

Menurut Basari, masih banyak warga di kawasan bantaran sungai yang seharusnya bisa ditampung di rusunawa, namun belum tertangani karena keterbatasan fasilitas yang tersedia. *(Stefani Yulindriani)*